

## DAFTAR PUSTAKA

- Faud, M.Ramli. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jusup, Al Haryono. 2012. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Edisi Ketujuh. Jilid Kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Kasmir. (2012), *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Keempat*. UPP STIM YPKM: Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2018. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahsun, Moh., Firma, Sulistyowati dan Heribertus, Andre Purwanugraha. 2018. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Munawir, S. 2010. *Analisis laporan Keuangan Edisi keempat. Cetakan Kelima Belas*. Yogyakarta: Liberty
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wita Liantino. 2018. Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) di Kota Surakarta. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/64356/>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2017 *tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018.*

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12 *tentang Laporan Operasional.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah.*

Bengkuluprov.go.id. 24 Juni 2017. *Provinsi Bengkulu Kembali Raih Penghargaan Platinum IAA 2019.* Diakses pada 11 Juni 2021, dari <https://bengkuluprov.go.id/provinsi-bengkulu-kembali-raih-penghargaan-platinum-iaa-2019/>.

Republika.co.id. 20 Juni 2017. *Pembangunan Jalan di Bengkulu Alami Berbagai Kendala.* Diakses pada 11 Juni 2021, dari <https://www.republika.co.id/berita/dpd-ri/berita-dpd/17/06/20/oru5d5368-pembangunan-jalan-di-bengkulu-alami-berbagai-kendala>.

Lokadata.id. 12 Desember 2018. *Porsi Belanja Pegawai APBD Sultra dan Bengkulu Tertinggi.* Diakses pada 11 Juni 2021, dari <https://lokadata.id/artikel/porsi-belanja-pegawai-apbd-sultra-dan-bengkulu-tertinggi>.

Republika.co.id. 2 Juni 2016. *BPK Temukan Banyak Masalah dalam Laporan Keuangan Negara.* Diakses pada 20 Agustus 2021, dari <https://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/06/02/o84upo361-bpk-temukanbanyak-masalah-dalam-laporankeuangan-negara>.